**VALUE FOR MONEY REALISASI ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PUSKESMAS BATURRADEN II   
(TAHUN 2017-2018)**

**VALUE FOR MONEY REALIZATITON OF BUDGET BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ON PUSKESMAS BATURRADEN II   
(PERIOD 2017-2018)**

**Agustin Nur Lathifah**

Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail : [agustinnurl87@gmail.com](mailto:agustinnurl87@gmail.com)

**Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi anggaran dengan pendekatan value for money yaitu dengan pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas pada Puskesmas Baturraden II. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan objek yang diteliti adalah data Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Baturraden II Tahun 2017 dan 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif pada pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pada tahun 2017 perhitungan value for money pada realisasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Batuuraden II adalah ekonomis, tidak efisien, dan efektif. Sedangkan pada tahun 2018 perhitungan value for money pada realisasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Baturraden II adalah ekonomis, tidak efisien, dan cukup efektif.

**Kata Kunci** : ekonomi, efisiensi, efektivitas

***Abstract***

*The purpose of this research is to know the realizatiton of budget with value for money that is economy, efficiency, and effectiveness in Puskesmas Baturraden II. This research is a descriptive of quantitative research with the object under study is data Realizatiton of Budget Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Baturraden II period 2017 and 2018. Data collection method used is documentation. The data analysis technique used is descriptive of quantitative measurement of economy, efficiency and effectiveness. Based on the results of research can be obtained that in the year 2017 measurement value for money realizatiton of budget Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) on the Puskesmas Baturraden II is economic, not efficient, and effective. Whereas in the year 2018 measurement value for money realizatiton of budget Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) on the Puskesmas Baturraden II is economic, not efficient, and effective enough.*

***Keyword*** *: economy, efficiency and effectiveness*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan manajemen keuangan daerah dan akuntansi pemerintah di Indonesia terus berjalan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan global. Penyempurnaan dan penyelarasan peraturan-peraturan yang terkait dengan keuangan daerah terus dilakukan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik agar adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada era reformasi sekarang ini, pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rangkaian bagaimana suatu Pemerintah daerah dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintah dengan baik. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah memberikan keleluasaan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pelayanan umum (Permendagri, 2018). Pelayanan umum tersebut berupa penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat yang diutamakan pada pelayanan kesehatan. Dengan adanya peraturan tersebut maka Pemerintah Daerah mendorong instansi-instansi kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat untuk menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Unit kerja di bidang kesehatan yang dapat menerapkan BLUD adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Kesehatan (Restianto, 2015). Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. Dalam penerapannya terdapat keleluasaan bagi pengelola BLUD untuk melakukan pengelolaan keuangannya, khususnya dalam memanfaatkan pendapatan yang diterima dari masyarakat. Pendapatan yang diterima tidak tidak lagi disetor ke kas daerah, melainkan dapat langsung dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran BLUD.

Pemerintah memberikan sejumlah fleksibilitas untuk instansi yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) antara lain dalam pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, utang, investasi, pemanfaatan surplus, dan remunerasi. Dalam sektor kesehatan, konsep kebijakan otonomi memberi wewenang dan keleluasaan kepada Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Kesehatan untuk mengelola sendiri anggaran dan pendapatannya guna membiayai kegiatannya.

Puskesmas Baturraden II merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten Banyumas yang sebagian besar pendapatannya berasal dari retribusi masyarakat dengan menyediakan layanan rawat jalan. Puskesmas Baturraden II menerapkan Badan Layanan Umum Daerah dengan status penuh berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/995/Tahun 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Dengan Status Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Dalam memberikan pelayanan yang bermutu, terjangkau dan profesional, maka Puskesmas Baturraden II harus dikelola secara profesional. Prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, optimalisasi, benefit dan cost harus menjadi indikator dalam pelaksanaannya. Agar dalam pengelolaan Puskesmas dapat fleksibel dan responsif diperlukan suatu bentuk tata kelola keuangan yang fleksibel pula dengan disesuaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Fahrudin, 2017).

Hal terpenting dalam menjalankan sebuah organisasi adalah anggaran. Menurut Halim dan Kusufi (2016) anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran pada Puskesmas Baturraden II terdiri atas Anggaran Pendapatan BLUD dan Anggaran Belanja Langsung BLUD. Proses penganggaran ini dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Tuntutan akan kualitas profesionalisme sektor publik dapat dinilai dengan konsep *value for money* (nilai daripada uang) dalam menjalankan aktivitasnya. *Value of money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). *Value of money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan Pemerintah Daerah mencapai *good governance*. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik *(public money)* yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik (Fahrudin, 2017). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara Pasal 1 ayat 6 menyebutkan tanggungjawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dari peraturan tersebut, konsep *value for money* merupakan salah satu elemen penilaian kinerja keuangan karena dalam konsep *value for money* diperhitungkan rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektifitas yang merupakan bagian dari peraturan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas maka untuk mengetahui tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan realisasi anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II menggunakan pendekatan Value For Money.

**RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana *value for money* realisasi anggaran badan layanan umum daerah pada Puskesmas Baturraden II tahun 2017?
2. Bagaimana *value for money* realisasi anggaran badan layanan umum daerah pada Puskesmas Baturraden II tahun 2018?

**LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Anggaran**

Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja (Abdul Halim, 2016). Menurut Sujarweni (2015:28) anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

1. Berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat.
2. Berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana-rencana tersebut.

Menurut Halim (2016) anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

***Value for Money***

*Value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009). Menurut Halim (2016) *value for money* merupakan konsep untuk mengukur ekonomi, efektivitas, dan efisiensi kinerja program, kegiatan dan organisasi. Tiga elemen utama pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, efisiensi dan efektivitas *(value for money).*

1. Ekonomi

Ekonomi merupakan perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi-organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

1. Efisiensi

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan *(cost of output).* Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya *(spending well)*.

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan *(spending wisely).*

**Badan Layanan Umum Daerah**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dengan tujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan praktek bisnis yang sehat (Permendagri, 2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah pasal 29 menyebutkan bahwa SKPD atau Unit Kerja dapat menerapkan Badan Layanan Umum Daerah apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Pada lingkungan pemerintah daerah, SKPD yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan dilampiri dokumen persyaratan administratif. Sedangkan Unit Pelaksana Teknis yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah maka permohonan diajukan kepada Kepala Daerah melalui Kepala SKPD. Kepala Daerah memberi keputusan penetapan atau surat penolakan terhadap usulan penetapan Badan Layanan Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak dokumen persyaratan diterima secara lengkap (Restianto, 2015). Penetapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berupa pemberian status BLUD Secara Penuh atau BLUD Bertahap. Status BLUD secara penuh diberikan apabila persyaratan substantif, teknis, dan administratif, telah dipenuhi dengan memuaskan (Restianto, 2015).

Berdasarkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Badan Daerah yang menerapkan BLUD menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang mengacu para Rencana Strategis (Renstra). Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) merupakan dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (Permendagri, 2018). Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) tersebut meliputi :

1. Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan
2. Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
3. Perkiraan harga
4. Besaran presentase ambang batas
5. Perkiraan maju atau *forward estimate*

Dalam pelaksanaan anggaran BLUD pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD. Laporan tersebut dilampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh pemimpin. Kemudian SKPD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD. Selanjutnya, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (Permendagri, 2018).

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu metode yang mendeskripsikan keadaan suatu gejala yang telah direkam melalui alat ukur kemudian diolah sesuai dengan fungsinya (Mardiasmo, 2009:4). Hasil pengolahan tersebut selanjutnya dipaparkan dalam bentuk angka-angka sehingga memudahkan peneliti untuk mengetahui informasi yang diperlukan.

**Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini yaitu di lingkungan Puskesmas Baturraden II.

**Populasi dan Sampel**

Populasi menurut Sugiyono (2017:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Puskesmas Baturraden II.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017:18). Sampel pada penelitian ini adalah Realisasi Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas Baturraden II Tahun 2017 dan Tahun 2018.

**Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut meliputi realisasi anggaran pendapatan dan pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah di Puskesmas Baturraden II. Data lainnya diperoleh dari internet, buku-buku, dan laporan tertulis lainnya.

**Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu dengan melakukan pencarian melalui sumber-sumber informasi berupa data dan dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan khususnya laporan realisasi anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Baturraden II.

**Metode Analasisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu suatu cara untuk analisis data yang bersifat kuantitatif dengan cara perhitungan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Mardiasmo (2009) perhitungan ekonomi, efisiensi, dan efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Ekonomi

Pengeluaran yang dimaksud dalam rumus diatas adalah total belanja. Kinerja pemerintah atau organisasi dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatakan ekonomis apabila nilai yang dicapai kurang dari 100% (seratus persen). Semakin kecil nilai ekonomi, maka kinerja pemerintah atau organisasi semakin baik. Adapun kriteria ekonomi :

|  |  |
| --- | --- |
| Nilai | Keterangan |
| X < 100% | Ekonomis |
| X = 100% | Ekonomis Berimbang |
| X > 100% | Tidak Ekonomis |

1. Efisiensi

Realisasi belanja yang dimaksud dalam rumus tersebut adalah total belanja. Kinerja pemerintah atau organisasi dalam melakukan pemungutan pendapatan akan semakin efisien apabila nilai yang dicapai kurang dari 100% (seratus persen). Semakin kecil nilai efisiensi maka kinerja pemerintah atau organisasi semakin baik. Adapun kriteria efisiensi :

****

*Sumber : Kemendagri No. 690.900-327 Tahun 1996.*

1. Efektivitas

Kemampuan organisasi dalam menjalankan tugasnya dikategorikan efektif apabila nilai yang dicapai sebesar 100% (seratus persen). Semakin tinggi nilai efektivitas, menggambarkan kemampuan organisasi yang semakin baik. Adapun kriteria efektivitas :

****

*Sumber : Kemendagri No. 690.900-327 Tahun 1996*

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II Tahun 2017-2018 Dari Segi Ekonomi.

*Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden*

*II Tahun 2017-2018 (Data Olahan, 2019).*

Berdasarkan hasil perhitungan selama dua tahun mengalami sedikit penurunan karena biaya yang direalisasikan lebih sedikit dibandingkan dengan yang dianggarkan. Hal ini membuktikan bahwa Puskesmas Baturraden II dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan dengan menghindari pengeluaran yang boros. Dari segi kriteria ekonomi, Puskesmas Baturraden II masuk dalam kategori ekonomis.

1. Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II Tahun 2017-2018 Dari Segi Efisiensi.

 *Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II Tahun 2017-2018 (Data Olahan, 2019).*

Berdasarkan hasil perhitungan selama dua tahun mengalami kenaikan dan masuk dalam kategori tidak efisien karena maka karena hasil dari presentase menunjukkan angka lebih dari 100%. Sehingga realisasi anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II masuk dalam kategori tidak efisien.

1. Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II Tahun 2017-2018 Dari Segi Efektivitas.

 *Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Baturraden*

*II Tahun 2017 (Data Olahan, 2019).*

Berdasarkan hasil perhitungan mengalami penurunan disetiap tahunnya. Hasil presentase tersebut mengalami penurunan namun masih dalam kategori efektif, maka realisasi anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II masuk dalam kategori efektif.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan *value for money* dan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II pada tahun 2017 adalah ekonomis, tidak efisien, dan efektif.
2. Realisasi anggaran BLUD Puskesmas Baturraden II pada tahun 2018 adalah ekonomis, tidak efisien, dan cukup efektif.

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, M. S. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Abdul Hamid, I. L. 2019. Evaluasi Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 2 No. 1 Hal. 31-41.

BLUD. 2018. *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.*

Christover Lantu, L. L. 2017. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 5 No. 2 Hal. 1260-1270.

Debby Firoeza Indiany, D. N. 2016. Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan PPK-BLUD Pada RSUD Kardinah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 1 No. 1.

Erawan, P. A. 2018. Peranan Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 8, No.3 Ha.l 187-193.

Fahrudin, M. 2017. Analisis Tingkat Ekonomis, Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan BLUD Puskesmas Sukoharjo Kabupaten Wonosobo. *Skripsi.* STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.

Harja, W. A. 2019. Analisis Kinerja Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus di Pusat Kesehatan Masyarakat Kutoarjo). *Skripsi.* Universitas Sanata Darma Yogyakarta.

Indriaswari, L. K. 2017. Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2014-2016. *Skripsi.* Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 900/995/Tahun 2017 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah Dengan Status Penuh Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 Tahun 1996 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.

Khalikussabir. 2017. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan Value For Money (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga & PU Cipta Karya Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 06 No. 3.

Kristy Harly, M. A. 2017. Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 5 No. 2.

Kuncoro. 2009. *Analisis Kinerja Berbasis Value For Money.* Makalah Seminar Diskoperidag Kota Pasuruan.

Kurniasari, R. 2014. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perusahaan Sebelum dan Sesudah Mengadopsi IFRS (International Financial Reporting Standard) pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011. *Skripsi.* Universitas Syiah Kuala Darussalam.

Mahmudi. 2007. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mahsun, M. 2013. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Offset.

Melissa Olivia Tanor, H. S. 2015. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 3 No. 3 Hal. 639-649.

Nordiawan, D. A. 2014. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta: Salemba Empat.

Novelya South, J. T. 2016. Pengukuran Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan Dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 4 No. 1 Hal. 613-622.

Ofasari, D. 2018. Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Dengan Menggunakan Metode Value For Money. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi.* Vol. 7 No. 2.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Purwiyanti, D. 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep Value For Money Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kodi (Study di Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu)*. Jurnal Manajemen.* Vol. 5, No. 3 Hal. 190-200.

Putra, W. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah.* Depok: Rajawali Pers.

Sitompul, T. R. 2018. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkayang. *Tesis.* Universitas Tanjungpura.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Yanuar E. Restianto, I. R. 2015. *Pengelolaan Keuangan BLU/BLUD (Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah).* Yogyakarta: STIM YKPN.